

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah segala bentuk kekerasan yang disebabkan tidak selarasnya distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Dirna, 2021). KBG menyangkut ketubuhan seseorang yang ada korelasinya dengan jenis kelamin. KBG biasanya lebih sering dialami oleh perempuan, sebab tubuh dan ruang hidupnya seringkali dipandang masyarakat sebagai hal yang tidak penting; tidak perlu untuk dibahas; memalukan dan aib bagi keluarga. Berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma masyarakat yang meminggirkan pihak-pihak tertentu; KBG merupakan bentuk diskriminasi yang berdampak pada terhalangnya perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasan mereka (SAFEnet, 2022).

Kasus KBG dengan wajah baru atau dikenal Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) tercatat mengalami adanya peningkatan jumlah aduan sejak tahun 2020. Terdapat total 940 kasus KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada tahun 2020, yang mana jumlah ini meningkat dari 660 kasus pada tahun 2019; dan 1.721 pengaduan yang diterima pada tahun 2021. Begitu pula dari laporan Lembaga Layanan mitra Komnas Perempuan, ada 126 kasus KBGO dilaporkan pada tahun 2019, sementara di tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 510 kasus dan 2021 ada 211 aduan kasus. Menurut basis data SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) mengenai kasus pelanggaran hak-hak digital, tahun 2021 tercatat 621 aduan kasus KBGO, sementara itu pada bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2022 tercatat

283 aduan kasus KBGO (SAFEEnet, 2022). Meningkatnya aduan kasus KBGO ini merupakan imbas tidak langsung dari naiknya juga angka pengguna internet di Indonesia sejak awal pandemi Covid-19 di tahun 2020. Sebagai bagian dari kehidupan manusia, teknologi digital dapat menjadi wadah penyalahgunaan dan melanggengkan kekerasan berbasis gender (SAFEEnet, 2022).

KBGO merupakan tindak kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. KBGO sendiri mempunyai maksud untuk melecehkan seseorang atas dasar gender atau seksualitas mereka, yang membuat perasaan tidak aman, menimbulkan penderitaan fisik, mental, atau seksual, dan mungkin juga kerugian finansial atau emosional (SAFEEnet, 2019). Sederhananya, KBGO merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah siber. KBGO telah menerima lebih banyak perhatian dari masyarakat luas selama dekade terakhir. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak buruk serta kerugian yang dirasakan korban, baik dari trauma emosional, reputasi yang rusak, percobaan bunuh diri, dan ketidakmampuan untuk mempertahankan pekerjaan. Contoh nyatanya pada tahun 2021, YF, seorang kepala TK di Gunung Kidul, dicopot jabatannya sebagai kepala sekolah oleh yayasan tempatnya mengajar karena kasus penyebaran konten intim miliknya yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri.

Di antara banyaknya modus dan tipe KBGO, kasus ancaman penyebaran konten intim dengan pemerasan (*sextortion*) dan kasus penyebaran konten intim non konsensual (*non-consensual distribution of intimate image/NCII*), menjadi jenis KBGO yang acapkali dijumpai dan dilaporkan kepada pihak terkait baik Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, maupun SAFEEnet. Terdapat peningkatan hampir 400% dalam kasus-kasus NCII pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Pada periode yang sama, 940 pengaduan diajukan ke Komnas Perempuan; sebagian

besar di antaranya terkait dengan ancaman atau penyebaran konten intim non-konsensual. Menurut Laporan Tahunan LBH APIK Jakarta, 322 dari 489 pengaduan KBGO yang diterima antara November 2020 dan Oktober 2021 merupakan kasus ancaman penyebaran konten intim milik pribadi. Pada triwulan pertama tahun 2022, kasus *sextortion* menjadi bentuk KBGO yang paling sering terjadi, diikuti dengan kasus NCII dibawahnya. Sedangkan pada triwulan kedua tahun 2022, kasus-kasus NCII naik ke posisi teratas, dengan kasus *sextortion* turun ke posisi kedua pada peringkat kasus KBGO yang paling banyak dilaporkan (SAFEnet, 2022).

Fenomena kasus ancaman dan pendistribusian konten intim non konsensual ini telah menjadi salah satu perbincangan publik dan sering muncul dalam sorotan media tidak terkecuali portal media siber. Media siber, sebagai generasi ketiga dari jurnalisme setelah media cetak dan penyiaran, telah memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada publik untuk mengikuti perkembangan peristiwa di seluruh dunia karena ketersediaannya selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kehadiran jurnalisme siber ini telah mengubah industri pers dimana faktor kecepatan jadi lebih penting. Foust dalam Romli (2015) mengemukakan salah satu keistimewaan jurnalisme siber adalah *immediacy* atau kecepatan dalam mempublikasikan informasi. Tidak cukup sampai disitu, judul dan isi berita dibuat dengan menggabungkan trivia dan sensasionalisme untuk meningkatkan jumlah klik pembaca. Tujuan komersial industri media siber menjadi penyebabnya. Yasraf dalam Marsun, Karo, & Wirasati (2022) menyebut isi media dibentuk dari setidaknya dua motivasi utama, yakni kepentingan ekonomi, dan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, kepentingan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama menjadi terabaikan.

Kasus kekerasan berbasis gender *online*; apalagi jika kekerasan tersebut terjadi pada pihak rentan seperti perempuan, akan selalu menjadi fenomena yang punya nilai

berita sebab daya tariknya tersendiri. Los & Chamard (1997) membeberkan bahwa sudah sejak lama liputan media terkait kekerasan seksual memiliki nilai dan potensi lebih serta dianggap sebagai komoditas yang menjanjikan. Media menyesuaikan diri dalam menanggapi permintaan pasar dengan cenderung memprioritaskan sensasionalisme, representasi kelompok marginal, dan eksplorasi tema yang berkaitan dengan perempuan dan seksualitas (Eriyanto, 2001).

Pemilihan diksi yang mengategorisasikan perempuan sebagai *janda muda*, *mahasiswa cantik*, *selebgram seksi*, dan kata tidak relevan lainnya dalam membalut judul berita maupun isinya, masih sering dipakai. Objektivikasi terhadap perempuan juga masih sangat sering terjadi karena anggapan bahwa perempuan merupakan komoditas yang punya daya tarik tinggi. Media masih sering melakukan pencampuradukkan fakta dan opini, pengungkapan identitas korban termasuk identitas pelaku anak, penggunaan diksi yang bias, serta mengarahkan pembaca untuk membentuk *stereotype* dan melakukan penghakiman kepada korban kekerasan (Komnas Perempuan, 2015).

Realitas di media dikonstruksi salah satunya dengan teknik framing, atau teknik menyajikan peristiwa dengan bingkai tertentu. Media mengonstruksi peristiwa dari sudut pandang tertentu, mengaburkan beberapa detail dan menonjolkan detail lainnya sehingga khalayak hanya akan mengingat detail yang ditonjolkan (Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, 2002). Kendatipun media telah menyampaikan fakta terkait pemberitaan kasus ancaman dan kasus pendistribusian konten intim non konsensual ini, tidak bisa dipungkiri bahwa peranan media dalam menyajikan kembali fakta yang ada disertai dengan menyeleksi isu dan memberikan penonjolan pada aspek-aspek tertentu dari realitas menunjukkan bahwa realitas yang ditampilkan media terdistorsi dan tidak sepenuhnya utuh.

Dalam memunculkan kembali seraya membangun realitas yang ada, pemahaman terhadap proses kerja di industri media tersebut menjadi hal yang vital. Ada lima level faktor yang turut memengaruhi konten media, yaitu level individu, praktik rutinitas media, organisasi media, pihak luar media (ekstramedia), dan ideologi (Shoemaker & Reese, 1996). Spirit ideologi yang kental pada level ideologi media, punya pengaruh sangat penting dalam memengaruhi konten media. Contohnya apabila disangkut-pautkan dengan pemberitaan kekerasan berbasis gender, berita di media akan dikemas dengan kecenderungan memposisikan perempuan sebagai manusia kelas dua, subordinat dan penyebab kejadian buruk yang menimpa dirinya; tidak mungkin untuk melepaskan peran ideologi patriarki dalam membentuk gambaran media yang seperti ini.

Maka dari itu, suatu isu yang dibingkai oleh media juga tidak lepas dari pengaruh ideologi yang dianut. Ideologi dikonstruksi dan disebarkan melalui media siber salah satunya dengan cara pembingkaiian (Aristi, Janitra, & Prihandini, 2021). Selain ideologi, kepentingan ekonomi dan politik pemilik media juga punya dampak besar bagi media dalam menampilkan pembingkaiian. Media menggunakan kekuasaannya dan mengambil keuntungan dari tindakannya yang mengemas berita cabul atau mengeksploitasi kasus kekerasan seksual menjadi berita yang menimbulkan rangsangan seksual pembaca serta nirempati pada apa yang dialami korban (Olivia, Warouw, & Senduk, 2020).

Portal media siber yang digadang-gadang dapat menggeser media massa konvensional untuk menjembatani pencarian informasi, tentu saja memiliki peran yang krusial karena kemampuannya dalam memobilisasi dan membentuk opini publik. Faktor ketergesaan media siber dalam menyampaikan suatu informasi, membuat publik sebagai pembaca seolah tidak lagi diberi kesempatan untuk berpikir

dan menimbang-nimbang berita yang ada. Opini publik berkaitan dengan framing karena isu dapat dimaknai secara berbeda tergantung dari bingkai yang digunakan untuk menyajikannya. Reaksi publik terhadap suatu isu akan dipengaruhi oleh bagaimana media melihat dan memahami isu tersebut (Eriyanto, 2002).

Penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan. Penelitian terdahulu merupakan instrumen yang krusial sebab berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti sekarang. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai batu loncatan untuk penelitian baru dengan memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan mengembangkan temuan-temuan pendahulunya. Menurut penelusuran penulis, masih sedikit penelitian yang membahas topik-topik terkait kasus ancaman, dan kasus penyebaran konten intim non-konsensual khususnya analisis framing pada portal media siber. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan berbasis gender secara umum.

Di antara penelitian tersebut, penulis menemukan penelitian yang dilakukan Daniel Susilo & Eben Haezer (2017). Penelitian yang berjudul *Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Berita Pemerkosaan di Teks Media Daring* ini bertujuan untuk membongkar bagaimana media mengonstruksi seksualitas perempuan dalam teks media di situs media siber JPNN.com dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Van Dijk. Selanjutnya penelitian Yofiendi Indah Indainanto (2020) yang meneliti mengenai konstruksi realitas dalam pemberitaan kekerasan seksual yang dimuat di media siber. Menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman, penelitian tersebut bertujuan untuk membongkar produksi teks media terkait pemberitaan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Lucinta Luna, ada empat

media yang dianalisis yakni Tribunnews.com, VIVA.co.id, Liputan6.com dan Okezone.com (Indainanto, 2020).

Penelitian serupa juga pernah dilakukan untuk meneliti bagaimana kecenderungan pemberitaan di media siber terkait konstruk realitas kekerasan seksual selama masa pandemi Covid-19 di media siber Kompas.com dan Okezone.com menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman (Aristi, Janitra, & Prihandini, 2021). Konstruksi realitas pemberitaan kekerasan seksual pun pernah diteliti menggunakan teknik analisis framing Robert N. Entman dengan objek analisis pemberitaan kekerasan seksual Novia Widyasari di media siber Suara.com, Kompas.com, dan CNNIndonesia.com (Hikmalia, Cangara, & Wahid, 2022). Selain penelitian diatas, ada pula penelitian yang dilakukan oleh Stara Asrita (2022) yang bertujuan untuk mengetahui bentuk seksisme pada pemberitaan kasus Gisella Anastasia di media siber Okezone.com dengan menggunakan analisis wacana model Sara Mills.

Kelima penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa kekerasan seksual-yang mana disini termasuk ke dalam Kekerasan Berbasis Gender; ketika disorot oleh media siber maka akan dihasilkan pemberitaan yang tidak sensitif gender dan cenderung melegitimasi ideologi patriarki. Contohnya mulai dari porsi keterangan dari pihak korban yang masih kurang, penonjolan kata-kata vulgar demi menarik perhatian pembaca, penggambaran perempuan yang tidak berdaya menghadapi dominasi laki-laki, kronologi kejadian yang disusun dengan mengesampingkan empati sehingga terkesan mencampuradukkan antara fakta dan imajinasi jurnalis, serta kerap ditemukan pemberitaan yang secara tidak langsung mengarahkan pembaca untuk menyalahkan korban. Namun, objek penelitian dari keempat penelitian yang disebutkan diatas bukan pemberitaan mengenai KBGO. Maka dari itu, keempat

penelitian tersebut hanya akan digunakan sebagai referensi, guna mendapatkan gambaran bagaimana konstruksi kekerasan berbasis gender pada pemberitaan di media siber.

Penelitian mengenai framing kasus KBGO yang diberitakan di media siber Indonesia sendiri masih terbatas. Salah satunya adalah riset yang dilakukan Tiara Angelica dan Reni Nuraeni (2022). Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki terhadap dua portal media siber yaitu Okezone.com dan Kompas.com mengenai pemberitaan kasus video 19 detik Gisella Anastasia periode 7 November 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Hasil komparasi 14 artikel masing-masing terbitan Okezone.com dan Kompas.com menunjukkan bahwa perempuan masih dijadikan objek seksualitas utama dengan memberi penekanan dan penonjolan informasi mengenai Gisella Anastasia sementara tersangka lain yang terlibat masih kurang mendapat *highlight*, bahkan Okezone.com cenderung lebih menonjolkan aktivitas seksual yang dilakukan pada video 19 detik tersebut (Angelica & Nuraeni, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan, penulis menyadari bahwa konstruksi realitas di media besar pengaruhnya oleh ideologi. Adapun penelitian ini sebagai bentuk kebaruan dari penelitian terdahulu baik dari segi objek, peristiwa, maupun metode penelitian.

Selanjutnya, untuk menyelami faktor apa saja yang memengaruhi pemberitaan, penulis membedah hal-hal tersebut dengan teori hirarki pengaruh isi media oleh Shoemaker & Reese (1996). Individu pekerja media, rutinitas media, organisasi media, luar media, dan ideologi; adalah lima level yang memengaruhi media dalam mengonstruksi dan memproduksi berita. Apa yang terjadi di satu level selalu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di level di atasnya. Meskipun kepemilikan media

sering dianggap menentukan pemberitaan media, namun pada kenyataannya, semua komponen dalam pembuatan berita akan bertumpu pada ideologi yang berfungsi sebagai lapisan terluar (Rusadi, 2015).

Dalam kajian komunikasi dan media, telah banyak penelitian serupa mengenai pemberitaan kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia, namun penelitian spesifik yang membahas kasus ancaman dan pendistribusian konten intim non konsensual masih terhitung minim. Minimnya pembahasan mengenai media yang memberitakan kasus ancaman dan pendistribusian konten intim non konsensual di Indonesia mengilhami penulis untuk meneliti fenomena ini. Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana portal media siber SINDOnews.com yang berada di bawah naungan MNC Group, dan Kompas.com yang di bawah manajemen PT. Kompas Cyber Media, melakukan pbingkaian terkait kasus ancaman dan pendistribusian konten intim non konsensual di Indonesia periode Januari-Juni 2022 dengan menggunakan pisau analisis framing Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki. Konsep framing dari Pan & Kosicki dipakai untuk menggambarkan praktik seleksi dan penonjolan aspek khusus dari realitas yang diangkat media. Model framing Pan dan Kosicki mengasumsikan setiap berita memiliki bingkai yang mengorganisir ide-ide. Pendekatan ini membagi perangkat framing ke dalam empat struktur utama, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan struktur retorik. Keempat struktur tersebut adalah rangkaian yang nantinya menunjukkan pbingkaian media (Eriyanto, 2002).

Dari hasil studi literatur, terdapat perbedaan ideologi media dari kedua media siber yang disebutkan diatas. Hal ini bisa diketahui dari bagaimana media menyusun pesan serta memilih diksi untukewartakan topik mengenai kekerasan gender. SINDOnews.com yang berfokus pada kasus kriminal dan hukum, cenderung menggambarkan perempuan punya citra yang buruk sebab dianggap sebagai sumber

permasalahan yang terjadi (Rohmah, 2017). Perempuan dipotret sebagai pihak yang selalu didominasi laki-laki, lemah, pasif, dan keputusan yang dibuat laki-laki selalu diterima tanpa perlawanan. Reportase dikemas dengan mengedepankan fantasi dan imaji dengan cara membuat berita dengan judul bombastis dan sensasional demi kepentingan kapital. Selanjutnya, pada Kompas.com dengan ideologi yang lebih humanis, cenderung memperlihatkan kebebasan dan memberikan ruang untuk perempuan untuk ikut bersuara. Kompas.com dalam mewartakan kasus kekerasan seksual terlihat menyajikannya dengan pembahasan kebijakan yang relevan dan telah berupaya untuk meliput dari dua sisi atau *cover both side* (Aristi, Janitra, & Prihandini, 2021). Selain itu, peneliti tertarik untuk meneliti kedua media ini karena keduanya pernah menjadi objek penelitian Komnas Perempuan terkait pemberitaan kekerasan seksual di media pada 2015 silam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua media tersebut masih melanggengkan *stereotype* dan penghakiman terhadap korban. Disamping itu, media juga cenderung tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang menarik perhatian pembaca (Komnas Perempuan, 2015).

Penulis memilih menganalisis kasus ancaman dan pendistribusian konten intim non konsensual sebab kasus ini masih menempati posisi atas diantara kasus KBGO lainnya. Mengacu pada laporan Pelanggaran Triwulan I (Januari-Maret) dan Triwulan II (April-Juni) tahun 2022 yang diterbitkan SAFEnet, kasus sekstorsi dan penyebaran konten intim non-konsensual menduduki peringkat satu dan dua kasus KBGO yang paling banyak terjadi di tahun 2022 (SAFEnet, 2022). Periode terbit Januari-Juni 2022 dipilih karena 6 bulan tersebut termasuk ke dalam Triwulan I dan Triwulan II, yang mana menjadi hal penting disini sebab ada banyak laporan kasus sehingga kedua media juga ramai mewartakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non konsensual dibingkai oleh portal media siber SINDOnews.com dan Kompas.com?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedah cara media siber SINDOnews.com dan Kompas.com dalam mengonstruksi berita terkait kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non konsensual dengan mencermati strategi seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya frame dalam pemberitaan di kedua media tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk:

1. Menambah pengetahuan terutama dalam mengidentifikasi bagaimana media membentuk frame terhadap kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non-konsensual yang kian marak terjadi
2. Memperkaya khazanah pengetahuan tentang kasus-kasus ancaman dan penyebaran konten intim non-konsensual khususnya dalam konteks analisis framing berita di media siber, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitiannya
3. Meningkatkan pemahaman khalayak terhadap bahaya ancaman dan penyebaran konten intim non konsensual

4. Sebagai bahan evaluasi media agar lebih seyogyanya menanggalkan bias-bias yang dianut selama ini dengan semaksimal mungkin

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Berita dan Konstruksi Realitas**

*Constructivism*, menurut Littlejohn (1996) adalah istilah untuk menggambarkan teori yang menyatakan bahwa individu menginterpretasikan sesuatu sesuai dengan kategori konseptual mereka. Paradigma konstruktivisme berpegang pada pandangan bahwa pengetahuan dan kebenaran objektif adalah hasil atau *output* dari perspektif. Pengetahuan dan kebenaran itu diciptakan, bukan memang sudah ada begitu saja. Realitas bersifat fleksibel dan jamak, dapat diproses dan dibentuk oleh tindakan yang disengaja (Triyono, 2021).

Ketika membahas konstruksi realitas, tidak mungkin mengabaikan teori konstruksi sosial atas realitas yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Keduanya berpendapat bahwa proses sosial terjadi melalui tindakan dan interaksi dimana manusia secara subjektif menciptakan realitasnya. Konstruktivisme merupakan upaya kognitif individu untuk menafsirkan realitas yang ada. Individu tersebut kemudian mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri tentang dunia berdasarkan struktur pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, yang disebut dengan skema atau skemata (Bungin, 2003). Konstruktivisme seperti ini yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial.

Realitas tidak muncul begitu saja, maka realitas disaring sesuai dengan bagaimana individu memandang sesuatu. Realitas dibentuk dan dikonstruksi, itulah sebabnya realitas memiliki dua wajah karena setiap individu mengonstruksi realitas secara berbeda. Individu akan mengonstruksi pemahaman tentang suatu realitas baru ketika mereka memahami suatu realitas yang tergantung dari cara berpikir serta

perspektif yang mereka miliki. Proses konstruksi realitas dimulai ketika konstruktor mempersepsikan suatu objek, dan menginternalisasi maknanya sebelum mengeksternalisasi melalui pernyataan (Badara, 2012).

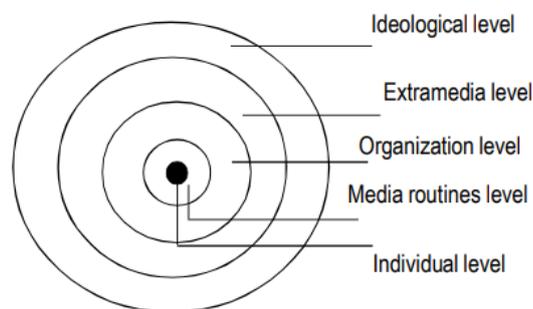
Gagasan Berger ini berlaku dalam konteks berita, dimana sebuah teks berita bukanlah salinan dari realitas, melainkan konstruksi realitas yang dibentuk oleh jurnalis. Akibatnya, setiap orang bisa saja mengkonstruksi suatu peristiwa secara berbeda. Jurnalis bisa saja memiliki cara pandang dan konsepsi yang berbeda terhadap suatu peristiwa, yang diwujudkan dalam teks berita.

Menurut teori konstruksi sosial, berita merupakan produk interaksi antara fakta dan jurnalis, bukan dari peristiwa atau fakta yang sebenarnya (Eriyanto, 2002). Sementara gagasan Berger dalam konteks pemberitaan kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non-konsensual di SINDOnews.com dan Kompas.com adalah bahwa apa yang ditulis jurnalis bukanlah gambaran dari peristiwa yang sebenarnya, melainkan realitas yang telah dibentuk jurnalis. Para jurnalis kedua media tersebut sudah tahu mana berita yang harus dan tidak harus dipublikasikan kepada khalayak. Sementara itu, apa yang ditulis jurnalis kemudian diedit oleh redaktur, sehingga apa yang muncul dan dibaca oleh pembaca kedua media tersebut merupakan realitas yang dikonstruksi oleh masing-masing media, dalam hal ini jurnalis dan redaktur.

Paradigma konstruktivis punya perspektif tersendiri tentang media, jurnalis, dan berita. Diyakini bahwa media tidak mungkin berada dalam keadaan netral, dan bebas dari pengaruh internal maupun eksternal. Subjektivitas jurnalis yang kemudian menghadirkan realitas. Jurnalis lah yang mendefinisikan dan menentukan pemaknaan dari suatu peristiwa. Demikian pula, institusi media dipandang tidak hanya sebagai

saluran bebas di mana pesan dipertukarkan, tetapi juga sebagai agen konstruksi realitas sosial, lengkap dengan bias, keberpihakan, dan sudut pandangnya (Eriyanto, 2002). Media adalah agen yang menafsirkan realitas bagi khalayak, dengan menyeleksi realitas mana yang akan disajikan, serta aktor mana yang akan ditampilkan. Berita merupakan konstruksi sosial yang menggabungkan ideologi, pandangan, dan nilai-nilai yang dianut jurnalis atau institusi media (Eriyanto, 2002). Berita yang dikonsumsi khalayak dilingkupi oleh berbagai kepentingan. Dengan demikian, berita yang dibaca setiap hari adalah hasil dari proses panjang di mana didalamnya ada keterlibatan semua elemen media dalam memproduksi dan memproses informasi.

Teori hirarki pengaruh isi media oleh Shoemaker & Reese menjelaskan bahwa faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi pemberitaan media (Shoemaker & Reese, 1996). Perbedaan setiap media dalam mengonstruksi dan memproduksi berita dibagi ke dalam beberapa level, yakni individu pekerja media (*individual level*), rutinitas media (*media routines level*), organisasi media (*organizational level*), luar media (*extramedia level*), dan ideologi (*ideological level*); yang digambarkan pada model *hierarchy of influence* atau lima lingkaran pengaruh.



**Gambar 1. 1** Lima Lingkaran Pengaruh Isi Media

Teori ini menunjukkan bahwa konten media yang disampaikan kepada khalayak tidak berasal dari “ruang hampa” yang netral ataupun bebas kepentingan, melainkan terdistorsi kombinasi antara kebijakan internal organisasi media dan pengaruh eksternal. Pengaruh internal terhadap isi media adalah kepentingan pemilik media, aktivitas pencarian berita dari individu jurnalis, dan rutinitas organisasi media. Sementara itu, faktor eksternal terhadap media antara lain meliputi pengiklan, pemerintah, dan masyarakat.

Shoemaker & Reese mengatakan bahwa apa yang terjadi pada satu level selalu dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh apa yang terjadi pada level di atasnya. Umumnya pada level organisasi media, seperti faktor kepemilikan media, selama ini dianggap sangat menentukan isi media. Namun, kita tidak bisa mengabaikan faktor-faktor yang ada pada level yang lebih tinggi, seperti level ideologi. Meskipun dianggap abstrak, faktor ideologi bersifat hegemonik dan berada di luar kesadaran organisasi media (Krisdinanto, 2014). Ideologi di sini mengacu pada ideologi media, baik sebagai suatu *pseudo reality* (kesadaran palsu), maupun sebagai bagian yang melekat pada sistem media. Pada akhirnya, semua aspek yang masuk ke dalam pembuatan berita akan bertumpu pada ideologi (Rusadi, 2015).

#### a. Level Individu Pekerja Media

Pada level yang merupakan lapisan paling dalam dari lingkaran teori pengaruh isi media, berkaitan erat dengan para pekerja media seperti jurnalis, reporter, redaktur, koordinator lapangan, dan lainnya. Sikap profesional (yang mengacu pada kode etik profesional individu pekerja media) memiliki pengaruh yang lebih besar pada konten media daripada keyakinan pribadi (keyakinan politik atau faktor demografis seperti jenis kelamin, etnis, orientasi seksual, dan sebagainya) (Shoemaker & Reese, 1996).

Jurnalis media dibentuk oleh serangkaian pengalaman, perspektif, dan nilai yang dianut. Setiap individu pekerja media memiliki perspektif dan pemahaman tersendiri tentang dunia. Dalam konstruktivisme, berita bukanlah fakta, melainkan produk interpretasi dan perspektif jurnalis yang merupakan proses internalisasi. Proses ini terus berlanjut hingga eksternalisasi, yakni interaksi dengan sistem politik tempat ia bekerja (Haryati, 2012).

b. Level Rutinitas Media

Level ini mencakup struktur, pola, mekanisme dan produksi penentuan berita di media. Siklus dan pola kerja mereka ditetapkan berdasar aturan dan rutinitas yang sudah berlangsung lama. Praktik ini bisa merupakan sebuah ideologi, karena diyakini dan dianggap sebagai sumber daya yang dapat diandalkan. Ideologi apa yang memotivasi rutinitas kerja media ini akan tercermin dalam ideologi media secara keseluruhan (Rusadi, 2015).

Tuchman dalam Shoemaker & Reese (1996) menyebut bahwa pada level ini, media akan menata ulang dan mengidentifikasi setiap peristiwa yang diterima sebelum disebarluaskan. Setiap peristiwa yang terjadi harus diseleksi dan diolah sedemikian rupa sehingga apa yang nantinya akan diwartakan adalah berita yang dipilih secara relevan.

c. Level Organisasi Media

Pada level organisasi ini, pemilik media memiliki pengaruh yang paling besar meski tidak terlibat langsung dalam proses produksi berita. Pengaruh kepemilikan media menjadi perhatian penting. Level ketiga ini meliputi bentuk struktur organisasi, kelembagaan, dan hubungan kerja. Ada tingkatan standar dalam organisasi media. Pekerja garis depan, seperti penulis, jurnalis,

dan kreatif, mengumpulkan dan mengemas bahan mentah untuk berita. Lapisan tengah, terdiri dari editor, manajer, dan produser, serta individu-individu yang mengoordinasikan proses, memfasilitasi komunikasi antara lapisan atas dan bawah, dan merumuskan kebijakan organisasi. Para eksekutif puncak perusahaan dan organisasi berita mengeluarkan kebijakan organisasi, menetapkan anggaran, membuat keputusan yang signifikan, menjaga kepentingan bisnis dan politik perusahaan, dan mempertahankan organisasi terhadap tekanan eksternal (Shoemaker & Reese, 1996).

Jika struktur organisasi adalah piramida; yang menggambarkan hubungan vertikal antara struktur tertinggi organisasi dan struktur terendahnya; maka akan berdampak pada panjangnya prosedur pengambilan keputusan. Sedangkan struktur organisasi yang berbentuk horizontal, memungkinkan rentang pengambilan keputusan yang lebih sempit. Pemilihan model struktural ini bergantung pada ideologi yang dikembangkan oleh media (Rusadi, 2015).

d. Level Luar Media (Ekstramedia)

Tingkatan keempat adalah level luar media, contohnya budaya, lingkungan sosial, dan iklim sosial politik daerah di wilayah institusi media berada. Lingkungan industri media akan berpengaruh pada proses pengumpulan berita. Ini semua adalah faktor di luar kendali organisasi berita, seperti kekuatan ikatan antara jurnalis dan sumbernya, pentingnya sumber berita dari orang tertentu, pengaruh pengiklan tertentu, karakteristik pasar, efek dari teknologi, serta kebijakan pemerintah; semuanya ikut bermain dalam memengaruhi level luar media (Shoemaker & Reese, 1996).

Hal ini menunjukkan bagaimana media tidak independen dan netral, melainkan rentan terhadap bias dari berbagai sumber. Secara sosiologis, media tidak dapat dipisahkan dari masyarakat; media berubah menjadi cerminan dari masyarakat yang mengonsumsinya. Untuk alasan ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran untuk memilih kekuatan eksternal mana yang ingin mereka intervensi (Rusadi, 2015).

e. Level Ideologi

Ideologi media mengacu pada filosofi atau sistem kepercayaan yang mendasari industri media (Rusadi, 2015). Level ideologi memiliki bobot cukup penting dalam memengaruhi konten media. Faktor ideologi merupakan pendorong di balik setiap level. Pada level ini, terlihat jelas bagaimana kekuatan media memengaruhi pemberitaan, dan bagaimana struktur yang lebih berkuasa diasumsikan memiliki kekuatan untuk memanipulasi peristiwa sesuai dengan yang diinginkan (Shoemaker & Reese, 1996).

Media secara tidak langsung telah menstandarisasi produksi berita dengan melakukan tugas jurnalistik berdasarkan ideologi yang dipegang. Ideologi berbentuk pengetahuan dalam bentuk aturan-aturan yang diterapkan dalam proses produksi berita. Pemilik media atau pemangku kekuasaan di media, berada dalam posisi utama untuk mengarahkan berita ke arah ideologi tertentu. Media tidak hanya berfokus pada peristiwa yang terjadi, tetapi juga pada khalayak yang akan membaca berita tersebut. Seperti halnya sebuah cerita, berita mengundang dan melibatkan pembacanya untuk berdialog bersama. Proses berdialog ini berfungsi untuk menempatkan pembaca secara halus ke dalam kerangka ideologi yang telah ditentukan. Oleh karena itu,

ketika berita dikonstruksi, tidak hanya peristiwa yang dijelaskan dalam peta ideologi tertentu, tetapi khalayak juga ditempatkan dalam peta ideologi tertentu (Eriyanto, 2002).

## **2. Analisis Framing Pan & Kosicki**

Istilah framing mengacu pada cara media menyajikan peristiwa. Dalam studi komunikasi, framing mengacu pada bagaimana media secara selektif menyajikan informasi tentang suatu topik (Sobur, 2015). Berada dalam payung paradigma konstruktivis, konsep framing pertama kali dikemukakan oleh Beterson pada tahun 1955, tahun 1974 Goffman mengembangkannya lebih lanjut. Menggunakan analisis framing, kita dapat memeriksa bagaimana berbagai media menyajikan informasi dan menarik kesimpulan tentang dunia.

Pan dan Kosicki mengklaim bahwa dalam framing, konsepsi psikologis dan konsepsi sosiologis saling berkaitan. Keduanya dapat terlihat dari bagaimana peristiwa dikonstruksi dan berita diproduksi. Paling tidak ada tiga pihak yang saling berhubungan disini, yakni jurnalis, sumber berita, dan khalayak. Nilai-nilai sosial dalam diri jurnalis dan proses produksi berita turut menentukan proses konstruksi. Khalayak pun ikut menjadi pertimbangan jurnalis, sehingga mau tidak mau nilai-nilai sosial dominan dalam masyarakat juga memengaruhi pemaknaan (Eriyanto, 2002).

Model framing Pan dan Kosicki mengasumsikan setiap berita memiliki bingkai yang mengorganisir ide-ide. Pendekatan ini membagi perangkat framing ke dalam empat struktur utama. Pertama, struktur sintaksis. Sintaksis adalah cara jurnalis menyusun pernyataan, opini, kutipan, dan pengamatan ke dalam struktur berita. Seperti yang ditunjukkan oleh dari *lead*, *latar*, *headline*, dan kutipan. Kedua, struktur skrip yang berhubungan dengan bagaimana jurnalis melaporkan peristiwa. Dapat

diamati dari kelengkapan berita 5W + 1H. Ketiga, struktur tematik. Jurnalis menyajikan pandangannya dalam bentuk paragraf, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Keempat, struktur retorik yang menunjukkan bagaimana jurnalis menggunakan kata, idiom, grafik, dan gambar untuk menekankan arti tertentu. Keempat struktur tersebut adalah rangkaian yang nantinya menunjukkan peningkatan media (Eriyanto, 2002).

### **3. Jurnalisme Media Siber dan Persoalan Kode Etik**

Evolusi industri media menuntut transformasi format media konvensional ke versi siber. Namun demikian, lahirnya media siber menyebabkan ambiguitas definisi antara media dan jurnalis. Kemunculan media baru tidak hanya memungkinkan mudahnya penyebaran informasi, tapi juga sekaligus membawa persoalan lama dalam kemasan baru. Yohanes Widodo (2010) merangkum beberapa dampak dari kaburnya batas-batas media dan jurnalis. Pertama, munculnya jurnalisme pernyataan (*journalism of assertion*); penyebaran opini dan rumor tanpa bukti yang kuat, menjadi ancaman yang signifikan terhadap kredibilitas jurnalistik karena minimnya *self control* apalagi *gate keeper*. Kedua, rendahnya standar etika jurnalisme yang dibuktikan dengan menjamurnya narasi sensasional. Ketiga, timbulnya peningkatan keluhan publik mengenai pelanggaran privasi yang dilakukan media. Keempat, terjadinya devaluasi profesi jurnalis karena kepercayaan yang meluas bahwa siapapun yang mampu menghasilkan liputan berita dapat dianggap sebagai jurnalis. Kelima, kebingungan yang berkaitan dengan konsep nilai dan kelayakan berita. Kebingungan ini muncul karena pemahaman yang terbatas terhadap Kode Etik Jurnalistik, yang mencakup prinsip-prinsip seperti objektivitas, adil, berimbang, menjunjung tinggi nilai kebenaran, serta penerapan *check* dan *recheck*.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi panduan dalam melaksanakan tugas, dalam penerapannya memiliki tantangan tersendiri mengingat prinsip-prinsip etikanya yang personal dan otonom. Meskipun KEJ sudah dijalankan sampai saat ini, namun sering kali implementasinya berbenturan dengan prinsip etika yang diharapkan dipatuhi oleh jurnalis dan media (Syam, Yuniati, Hardi, & Tabroni, 2021).

Ekosistem media yang makin berkembang memiliki dampak yang signifikan terhadap karakteristik dan pertimbangan etika media. Mengejar ketepatan waktu dalam lanskap persaingan media siber berimbas pada penyebaran informasi yang tidak akurat. Banyak eksploitasi, ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam produk media sebab paradigma kompetitif yang telah mencemarkan performa pers (Kurnia, 2017). Tidak lagi melayani publik, pers lebih melayani kepentingan kelas, seks, dan etnisitas dari stratifikasi sosial (Kurnia, 2017).

Lemahnya pengawasan media siber mengakibatkan minusnya verifikasi konten berita yang ketat, penggambaran peristiwa yang kurang tepat, bahkan terjadinya kesalahan yang mengharuskan adanya penarikan berita atau permintaan maaf dari redaksi (Syam, Yuniati, Hardi, & Tabroni, 2021). Selain itu, ranah persaingan media siber semakin diramaikan oleh keberadaan *Search Engine Optimization* (SEO), di mana banyak banyak media siber yang memanfaatkannya sebagai sarana untuk mendapatkan klik, pembaca, dan keuntungan semata yang juga diikuti dengan pengabaian pertimbangan kualitas konten dan standar etika. Misalnya, penggunaan judul berita *clickbait*, konten berlebihan dan sensasional, serta penggabungan ilustrasi visual yang eksplisit; yang semuanya secara terang-terangan bertentangan dengan pedoman yang tertuang dalam pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

Jika terkait dengan pemberitaan kekerasan seksual, temuan penelitian Komnas Perempuan tahun 2015 mengindikasikan bahwa masih banyak media yang tidak mematuhi kaidah Kode Etik Jurnalistik. Umumnya, pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pada pasal 3, yang menyatakan bahwa “*Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah*”; kemudian pasal 4 yang berbunyi “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul*”; dan pasal 5 “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan*”.

Dari pengamatan Yvonne Jewkes (2005) perempuan yang terlibat dalam kasus akan selalu mendapat sorotan di media dan secara konsisten dianggap menanggung konsekuensi dua kali lipat. Kekerasan berbasis gender sering kali dikonstruksi dengan cara yang dramatis dan sensasional. Jurnalis terlibat dalam lingkungan yang kompetitif di mana mereka berusaha untuk meningkatkan daya tarik khalayak dengan mempublikasikan berita yang berkaitan dengan pemerkosaan, pelecehan seksual, perzinahan, perselingkuhan, dan topik-topik mesum lainnya (Syam, Anisah, Saleh, Usman, & Khairani, 2020). Tidak berhenti disitu, Susilo (2015) menaksir bahwa liputan di media tentang kekerasan seksual, dimaksudkan untuk memberikan kepuasan fantasi dan citra seksual kepada pembaca.

Daniel Susilo (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konstruksi media terhadap kekerasan seksual, dapat diamati dari penggunaan judul dan isi yang sensasional, hal ini dianggap sebagai strategi pengaburan redaksi pada tindakan kekerasan. Tong (2010) menegaskan bahwa penaklukan feminitas akan terjadi secara sistematis melalui kerangka pemikiran dan perilaku maskulin. Implementasi *male*

*gaze* yang dipergunakan dalam teks berita menunjukkan nyatanya kerangka berpikir maskulin. Seringkali dalam pemberitaan media mengenai kekerasan seksual, perempuan yang mengalami viktimisasi dikonstruksi sebagai individu yang tidak berdaya dari individu yang memiliki otoritas atau laki-laki.

Media terus menggabungkan informasi faktual dan opini pribadi, mengabaikan hak-hak privasi korban dan kebutuhan anonimitas pelaku anak. Media juga masih kekurangan liputan mengenai pemenuhan hak-hak korban. Penggunaan diksi yang bias oleh media terus terjadi dan melanggengkan kecenderungan pembaca untuk membentuk stereotipe dan menghakimi korban. Lebih jauh lagi, media juga cenderung tergesa dalam menarik kesimpulan melalui penggunaan kalimat-kalimat yang menarik perhatian (Komnas Perempuan, 2015).

Topik kekerasan berbasis gender yang dikonstruksi secara seksis menjadi salah satu isu yang dominan, bahkan banyak yang melampaui batas etika. Terbatasnya pemahaman di kalangan jurnalis tentang penerapan jurnalisme yang sensitif dan responsif gender, memiliki implikasi yang signifikan terhadap karya jurnalistik yang berujung pada konten yang bias gender dan tanpa verifikasi. Masalah ini sangat terasa di ranah media siber yang menuntut aktualitas.

Platform media siber menghadapi situasi dikotomis yang kompleks dan saling berhubungan. Satu sisi dari masalah ini berkaitan dengan keharusan untuk menyebarkan berita secara cepat, sementara sisi lainnya berkaitan dengan integritas dan pertimbangan etika pemberitaan. Dikotomi ini menempatkan media siber dalam keadaan yang dilematis. Konstruksi media melanggengkan operasi yang dialami perempuan. Media yang dianggap sebagai pengawas kekuasaan, justru malah menjadi pengukuh kekuasaan karena lemahnya kompetensi profesional dan etika media, yang

menyebabkan perempuan menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan kapitalis (Syam, Yuniati, Hardi, & Tabroni, 2021).

Ashadi Siregar dalam Zikri (2013) mengemukakan bahwa sektor jurnalisme di Indonesia, termasuk lembaganya, menunjukkan bias gender yang signifikan dalam menyikapi isu-isu perempuan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa bias ini sering kali berakibat pada pelanggaran pedoman etika yang telah ditetapkan. Orientasi jurnalisme yang masih bersifat patriarkis telah mengakibatkan marjinalisasi perempuan dan pengalamannya. Sayangnya, masyarakat kontemporer, termasuk media, menunjukkan tingkat kepekaan yang minus terhadap fenomena ini.

#### **4. Ekonomi Politik Media dan Komodifikasi Konten**

Konsep ekonomi politik media berangkat dari asumsi bahwa media diyakini sebagai entitas komersial yang inheren dengan kekuasaan. Asumsi ini didasarkan pada pemahaman ekonomi politik yang berpendapat bahwa kekuasaan (politik) dan fenomena ekonomi saling terkait erat. Kehadiran media yang berada di antara persimpangan kekuatan ekonomi dan politik membuatnya rentan terhadap pengaruh yang diberikan oleh kedua kekuatan tersebut (Haryono, 2019). Informasi yang disebarkan di media seringkali mencerminkan agenda ekonomi dan atau politik tertentu. Pendekatan ekonomi politik media mengkaji media melalui lensa dinamika kekuasaan, yang secara khusus berfokus pada kontrol sumber-sumber produksi media, kepemilikan rantai distribusi media, dan pembentukan pola konsumsi publik terhadap media dan komoditas lainnya; sebab dalam studi tentang kepemilikan dan kontrol media selalu merefleksikan kepentingan pihak yang memberikan dukungan finansial.

Dalam ranah ekonomi politik media, interaksi antara kekuasaan (power) dan fenomena ekonomi merupakan prioritas utama karena sebagai titik fokus dari semua aktivitas pasar. Dapat dilihat bagaimana kekuasaan berperan penting dalam

membentuk kebijakan yang selaras dengan kehadiran kelompok-kelompok yang ada di dalam pasar. Kehadiran kekuatan pasar paling tidak berperan dalam mendukung prinsip kapitalisme. Pengaruh kepentingan ekonomi (*economic interest*) dan kepentingan kekuasaan (*power interest*) berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendasari pembentukan konten media. Besarnya pengaruh kepentingan ekonomi dan kekuasaan inilah yang sesungguhnya menyebabkan ketidakmampuan pada media untuk menjaga netralitas, kejujuran, keadilan, objektivitas, dan keterbukaan.

Vincent Mosco (2009) mengemukakan tiga konsep dasar yang berkaitan dengan teori ekonomi politik media, yakni komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Konsep komodifikasi yang diasosiasikan dengan kapitalisme ini muncul dari proses pemanfaatan barang dan jasa berdasarkan kegunaannya, yang kemudian ditransformasikan menjadi komoditas yang mendapatkan nilai dari pasar. Merujuk pendapat Wirawan (2017), berbagai entitas seperti objek maupun tanda yang disulap menjadi komoditas, fungsi utamanya menjadi sesuatu yang dapat dijual di pasar. Setidaknya ada tiga bentuk komodifikasi yang berbeda, yakni komodifikasi konten, komodifikasi audiens, dan komodifikasi pekerja.

Komodifikasi konten dianggap sebagai upaya yang disengaja oleh media untuk memperhalus atau mengubah substansi pesan semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Fokus dari komodifikasi ini terletak pada identifikasi korelasi antara komoditas konten dan pemaknaannya. Konten media dibuat sedemikian rupa untuk menarik perhatian publik, meskipun tidak memiliki dasar faktual atau tidak memenuhi kebutuhan publik yang sesungguhnya. Komodifikasi konten dilihat sebagai bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pengelola media yang memanfaatkan topik-topik yang memang sedang populer, dicari, atau mampu menarik perhatian publik (Haryono, 2019). Media akan selalu secara konsisten menghasilkan pesan atau konten media yang

dapat disusun secara strategis untuk memiliki daya tarik komersial yang signifikan dan menghasilkan keuntungan finansial bagi pemilik modal.

Manajemen organisasi media saat ini mengejar orientasi komersial yang hanya mengutamakan penyediaan hiburan kepada publik (Kurnia, 2017). Layaknya yang dikemukakan oleh Keeble dalam Rahmitasari (2013), adanya tekanan ekonomi telah melatarbelakangi pengorbanan standar-standar yang berkaitan kepentingan, kedalaman liputan, dan keragaman demi menekankan skandal, kekerasan, seks dan sensasi. Dalam manifestasinya, terbukti bahwa pesan dan konten media tidak memiliki netralitas atau bebas nilai. Sebaliknya, media sering kali “memanipulasi” pesan demi menyelaraskan dengan preferensi pasar. Dimasukkannya elemen sensasional dalam produk media adalah strategi umum yang digunakan untuk memikat khalayak. Hal ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Mosco (2009), bahwa teknologi digital mengoptimalkan dan menyempurnakan komodifikasi konten.

Liputan media tentang kekerasan seksual telah sejak lama diakui sebagai komoditas yang berharga dan menjanjikan (Los & Chamard, 1997). Media beradaptasi untuk memenuhi permintaan pasar, yang cenderung menyukai sensasionalisme, penggambaran individu yang terpinggirkan, dan eksploitasi tema-tema yang berkaitan dengan perempuan dan seksualitas (Eriyanto, 2001). Oleh karena itu, setiap produksi media yang berkaitan dengan perempuan harus mengikuti standar dan selera yang ditentukan oleh kacamata laki-laki. Komodifikasi perempuan di media merupakan salah satu akibat dari fenomena ini. Ibrahim dalam Nuzuli (2021) memaparkan bahwasanya produk media berfungsi sebagai gambaran dari realitas yang dikonstruksi, yang menyoroti konstruksi perempuan sebagai komoditas yang tunduk pada negosiasi yang digerakkan media. Perempuan dikomodifikasi dan dieksploitasi oleh media untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam istilah ekonomi, laki-laki dianggap sebagai

konsumen utama dan pendorong permintaan pasar, sedangkan perempuan dipandang sebagai pemasok utama. Maka sebab itu kesuksesan komersial media dapat dikaitkan dengan penggambaran seksualitas, karena menarik bagi khalayak laki-laki dan memberikan mereka hiburan (Nuzuli, 2021).

Dalam melakukan komodifikasi konten peristiwa kekerasan seksual, media memiliki kecenderungan mengedepankan aspek sensasional daripada unsur substantif peristiwa yang terjadi (Doko, 2019). Hal ini terwujud dari penggunaan bahasa dan diksi dalam penulisan berita. Seringkali kronologi kejadian ditulis secara rinci, baik bagaimana dialog korban dan pelaku maupun proses terjadinya kejadian yang bahkan jurnalis sendiri tidak berada di tempat kejadian namun mengandalkan sumber sekunder untuk kutipan informasi. Terlebih jika korban merupakan perempuan, judul dan isi berita dibuat semenarik mungkin sehingga melanggengkan anggapan bahwa perempuan adalah objek seksual yang secara konsisten menghasilkan wacana yang menarik untuk diperbincangkan. Konstruksi perempuan melalui sensasionalisme mengakibatkan marginalisasi karena mereka sering distereotipe dan diobjektifikasi sebagai komoditas belaka sebagai “penglaris” konten media (Nuzuli, 2021).

Media memainkan peran penting dalam ruang publik, yang berfungsi sebagai *platform* untuk penciptaan dan distribusi bahasa dan simbol. Media menciptakan wadah dimana beroperasinya perang bahasa atau perang simbol, dengan tujuan untuk mendapatkan penerimaan publik atas konsep ideologi yang diusung (Muzairi, 2014). Penyusupan dan pemberian pengaruh oleh ideologi melalui media terjadi secara tersembunyi, yang menghasilkan transformasi terhadap perspektif khalayak tanpa mereka sadari.. Khalayak merupakan lahan potensial bagi pemilik media untuk menyebarkan ideologi dan secara bersamaan mencapai tujuan mereka (Gora & Irwanto, 2015).

Perempuan seringkali dieksploitasi atau disubordinasi baik untuk mempertahankan dominasi dan hak istimewa milik laki-laki, atau demi melayani kepentingan tertentu yang diyakini sejalan dengan motivasi kapitalis (Afneta, 2015). Konstruksi perempuan sebagai komoditas dalam produk media mencerminkan manifestasi dari ideologi patriarki, dimana perempuan diposisikan sebagai individu yang subordinat, pelengkap, dan objek hasrat dalam dunia laki-laki yang dominan (Piliang, 2003).

Pemanfaatan perempuan dan penggambarannya sebagai komoditas dalam media hiburan masyarakat kapitalis telah memunculkan beragam persoalan yang tidak hanya melibatkan relasi ekonomi, akan tetapi juga pada relasi ideologi. Secara khusus, penggunaan tubuh dan citra perempuan mengisyaratkan indikator relasi sosial terutama yang berkaitan dengan relasi gender yang dikonstruksi berdasarkan ideologi tertentu.

Pendekatan ekonomi politik media tidak hanya mencakup masalah ekonomi semata, tetapi juga keterkaitan antara aspek politik, teknologi, dan budaya dalam realitas sosial. Seautentik apapun teknologi, dalam masyarakat kapitalis, secara inheren ia akan berfungsi untuk melanggengkan dominasi (Afneta, 2015).

## **5. Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia**

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan untuk mengintimidasi, memaksa ataupun mengancam yang bertujuan mendapatkan kepatuhan dari orang lain tanpa persetujuan mereka (Haryatmoko, 2010). Dominasi terhadap orang lain melalui kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, pelecehan fisik, verbal, moral, maupun psikologis. Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah bentuk kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi informasi komunikasi. KBGO adalah pelecehan yang disengaja terhadap orang lain atas dasar jenis kelamin atau seksualitas mereka, dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual, ekonomi atau

emosional (SAFEnet, 2019). SAFEnet (2022) merangkum definisi dan perkembangan bentuk KBGO dalam Tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1. 1**  
Bentuk-bentuk KBGO dan definisinya

<b>Bentuk KBGO</b>	<b>Definisi</b>
<i>Online Surveillance/ Cyber Stalking/ Stalking and Monitoring</i> (Penguntitan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguntitan melibatkan insiden yang berulang-ulang, mungkin tampaknya tidak berbahaya, tetapi gabungan tindakan yang membentuk pola menakutkan dapat melemahkan rasa aman dan menyebabkan korban kesusahan, ketakutan ataupun merasa terintimidasi</li> <li>• Dapat berupa pengiriman pesan berulang kali yang menyinggung/mengintimidasi ataupun mengirimkan konten intim seseorang</li> <li>• Melacak lokasi atau memasang perangkat lunak penguntitan (<i>stalkerware</i>) pada perangkat korban</li> <li>• Hal ini secara lebih mudah dilakukan oleh pasangan intim/keluarga/teman</li> </ul>
<i>Cyber harassment/ Harrasment/ Networked harassment</i> (Ancaman perkosaan atau pembunuhan)	<p>Komunikasi digital yang tidak diinginkan, bisa terjadi dalam bentuk insiden serangan komentar rasis atau seksis, dapat pula meluas menjadi tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan rayuan bernuansa seksual melalui surat elektronik atau pesan tanpa persetujuan sebelumnya</li> <li>b. Membuat rayuan seksual secara eksplisit melalui jejaring sosial online atau layanan pesan instan</li> <li>c. Ancaman melalui email atau pesan instan yang berisi ancaman kekerasan fisik atau seksual</li> <li>d. Ujaran kebencian dengan menargetkan seseorang berdasar dari identitasnya (jenis kelamin) maupun ciri-ciri pengenal lainnya (seperti orientasi seksual atau disabilitas)</li> <li>e. Pelecehan juga dapat mencakup ancaman kekerasan fisik, seperti pemerkosaan atau pembunuhan</li> </ol>
<i>Image-Based Sexual Abuse/ non-consensual distribution of intimate images/ Non-consensual pornography/ revenge porn/Malicious Distribution</i> ; bisa juga dalam bentuk <i>sexting</i>	<p>Tindakan berbagi foto atau video intim secara online tanpa izin atau persetujuan (biasanya dilakukan oleh mantan pasangan) atau berbagi foto atau video eksplisit secara seksual secara online tanpa izin. Sedangkan <i>sexting</i> mengacu pada praktik mengirim atau menerima foto atau video eksplisit secara seksual melalui pesan teks.</p>

<p><i>Voyeurism/creepshots</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil foto atau video intim orang lain tanpa sepengetahuannya untuk tujuan seksual. Mengambil foto korban dari lokasi yang tidak terdeteksi, atau bahkan mendistribusikan konten tersebut secara <i>real time</i> ke audiens yang tidak diminta</li> <li>• Dapat berupa pemasangan kamera di toilet, ruang ganti, atau area lain yang biasanya dianggap terlarang untuk umum</li> <li>• Istilah <i>creepshots</i> mengacu pada praktik mengambil gambar seseorang dan kemudian dipublikasikan secara <i>online</i> sehingga publik dapat melihat dan mengomentari. Tujuannya untuk mempermalukan atau melakukan seksualisasi pada pihak yang ada di dalam gambar tersebut</li> </ul>
<p><i>Sexploitation</i></p>	<p>Menghasilkan uang dari situs web yang digunakan untuk mendistribusikan konten intim secara ilegal</p>
<p><i>Sextortion</i> (Pemerasan seksual)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksa seseorang melakukan sesuatu melalui ancaman bahwa pelaku memiliki, atau mengklaim memiliki konten seksual miliknya</li> <li>• Tindakan ini tidak hanya dapat terjadi oleh pasangan yang memiliki hubungan romantis, orang asing juga dapat melakukan tindakan ini</li> </ul>
<p>Mendokumentasi ataupun menyiarkan kekerasan seksual</p>	<p>Dengan sengaja membuat konten kekerasan seksual untuk disiarkan ke publik.</p>
<p><i>Synthetic Media/Morphing</i> (Media Buatan)</p>	<p>Membuat gambar seksual palsu atau buatan komputer yang menampilkan wajah orang sungguhan yang ditumpangkan pada tubuh yang bercitra seksual.</p>
<p><i>Public Disclosure of Private Information/ Doxing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkapkan informasi pribadi tentang seseorang di depan umum dengan maksud untuk mempermalukan, melecehkan, atau merugikan orang tersebut.</li> <li>• Mempublikasikan nama, alamat, nomor telepon, informasi kontak, SIM, tempat kerja, dan dokumen atau korespondensi pribadi seseorang tanpa seizin orang tersebut.</li> <li>• Dalam praktiknya, <i>doxing</i> sering digunakan untuk mengintimidasi korban dengan memprovokasi orang lain di media online untuk melecehkan korban,</li> </ul>

	sehingga korban khawatir bahwa mereka akan dilecehkan atau disakiti.
<i>Defamation and Misrepresentation</i> (Penghinaan dan fitnah)	Publikasi informasi yang salah atau menyesatkan tentang seseorang yang dapat merusak reputasi mereka, seperti foto atau video yang eksplisit secara seksual.
<i>Impersonating</i> (meniru identitas orang lain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat identitas palsu secara online dan menggunakannya untuk melecehkan, mengancam, atau menyebabkan masalah bagi orang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka</li> <li>• Menyamar sebagai orang lain untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi korban adalah kemungkinan lainnya</li> </ul>
<i>Hate speech</i> (Ujaran kebencian)	Menghasut permusuhan terhadap seseorang karena identitasnya (ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, dll.)
<i>Hacking</i> (Peretasan)	Menyalahgunakan kata sandi, mengendalikan fungsi komputer seperti membekukan komputer atau <i>logout</i> , dan sarana teknologi lainnya untuk mendapatkan akses ilegal atau tidak sah ke sistem atau sumber daya dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah atau memodifikasi informasi, atau memfitnah dan merendahkan korban.
Rekrutmen	Dengan menggunakan iklan dan situs web, pelaku perdagangan orang berkomunikasi satu sama lain dan memikat korban ke dalam situasi berbahaya dengan memberikan informasi palsu seperti konten atau iklan bodong (situs web kencan, peluang kerja).
KBGO terhadap anak ( <i>cyber grooming</i> )	Dalam hal kekerasan seksual terhadap anak, <i>cyber grooming</i> adalah salah satu bentuk KBGO. Seringkali, jenis KBGO ini melibatkan viktimisasi atau eksploitasi anak melalui aktivitas seksual atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya setelah menjalin pertemanan dan ikatan emosional dengan anak tersebut.

Meskipun jenis kekerasan ini terjadi secara *online*, namun kekerasan ini terkait erat dengan konteks sosial di mana kekerasan tersebut terjadi. Dibanding laki-laki, kekerasan di ranah *online* ini nyatanya lebih banyak dialami oleh perempuan, yang mana kekerasan ini sering kali menargetkan tubuh maupun seksualitasnya. Hal ini karena konstruksi sosial yang memandang perempuan hanya sebagai objek seksual,

tubuh perempuan tak lebih dari sekadar aksesoris dekoratif (Sugiyanto, 2021). Sedangkan laki-laki, dalam asumsi budaya terkait KBGO, sering kali dikaitkan dengan kekerasan dan perilaku agresif yang melekat padanya (Nugraha & Anugraputri, 2022).

KBGO masih menjadi topik yang sangat tabu di Indonesia, ditambah lagi dengan fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sangat dinormalisasi. Wacana penyangkalan dipandang sebagai strategi untuk menjaga keharmonisan di mana beberapa orang memilih untuk menutup mata demi menghindari konflik (Nugraha & Anugraputri, 2022). Perempuan seringkali digambarkan sebagai pihak yang “mengundang” tindakan kekerasan dengan tidak mengikuti standar apa yang dianggap sebagai “perempuan yang baik dan penurut”. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki sering kali dibenarkan dengan klaim bahwa mereka tidak dapat mengendalikan tindakan, dan didorong pula oleh faktor eksternal seperti asumsi bahwa kekerasan juga dipicu oleh sikap perempuan (Nugraha & Anugraputri, 2022).

Seperti bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, KBGO merupakan ekspresi dari dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dan merupakan sarana untuk menundukkan perempuan dalam masyarakat dan budaya. Budaya sistem patriarki yang menjunjung tinggi hierarki dominasi dan kontrol di dunia maya merupakan akar dari KBGO. Penggunaan kekerasan fisik tidak lagi menjadi komponen penting dari kekerasan, tetapi sifat-sifat dominasi dan kontrol yang berlebihan masih ada. KBGO adalah fenomena *online* yang merupakan gejala dari struktur patriarki yang membuat laki-laki (pada banyak kasus) percaya bahwa mereka memiliki hak untuk melecehkan perempuan dan orang-orang dengan beragam gender secara online. KBGO merupakan perluasan dari kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ruang-ruang fisik, namun

seringkali kedua kekerasan tersebut terjadi secara bersamaan (Lintang, Farhanah, & Ningtyas, 2022).

Karakter KBGO bermanifestasi sebagai ekspresi relasi kuasa yang timpang, diskriminasi gender, kekerasan dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai aktor yang berbeda, serta punya keterkaitan atau saling berpengaruh pada kekerasan berbasis gender dunia nyata. KBGO dimotivasi oleh kekuasaan, kontrol, pemerasan, keuntungan, dan kepemilikan (Lintang, Farhanah, & Ningtyas, 2022). Alih-alih melindungi privasi korban, media dan masyarakat umum justru mempublikasikan detail kehidupan pribadinya. Sebaliknya, masyarakat malah memojokkannya dengan memberikan penilaian moral terhadap perempuan (Sugiyanto, 2021). Tidak jarang masyarakat lebih menyalahkan korban ketimbang pelaku (*victim blaming*).

Kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non-konsensual yang mana termasuk ke dalam Kekerasan Berbasis Gender *Online* menunjukkan tren yang terus meningkat. Bentuk KBGO paling umum yang terjadi terhadap perempuan menurut data yang dikumpulkan dari tahun 2017 hingga 2022, adalah pelecehan siber, penguasaan konten secara ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, dan perekrutan *online*. Jenis pelecehan ini jarang terjadi secara terpisah, dan sering kali diikuti oleh serangkaian tindakan kekerasan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan mengembangkan diri, depresi, kecemasan; adalah beberapa kerugian yang dialami oleh para korban dari kasus penyebaran konten intim non-konsensual (Veda, 2021).

Konten intim meliputi foto, video, rekaman audio, tangkapan layar, serta bentuk konten digital lainnya atau pun dalam bentuk fisik yang berisi ekspresi ketubuhan, ketelanjangan, dan atau aktivitas seksual dalam bentuk apapun (termasuk mencium,

menyentuh organ intim, dan penetrasi) baik yang dilakukan sendiri atau orang lain dengan persetujuan dan untuk konsumsi pribadi (Veda, 2021).

*Consent* atau konsensual adalah kesepakatan dan persetujuan yang diberikan setiap pihak yang terlibat ketika hendak melakukan aktivitas terkait ketubuhan, termasuk aktivitas seksual yang mencakup berpelukan, berciuman, bersentuhan, atau hubungan seks (Veda, 2021). Kedua belah pihak harus menyatakan dengan tegas dan penuh keyakinan. Persetujuan seseorang terhadap sesuatu tidak menjamin bahwa mereka akan terus mempertahankan persetujuan tersebut dari waktu ke waktu. Sebaiknya persetujuan harus dipertanyakan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu aktivitas, karena manusia bisa saja berubah pikiran.

*Consent* juga merupakan hal yang krusial menyangkut berbagai pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas yang menghasilkan dokumentasi digital baik dari bentuk foto, video, rekaman audio, tangkapan layar, maupun bentuk digital lainnya. Informasi pribadi, ekspresi tubuh, ketelanjangan, dan aktivitas seksual yang didokumentasikan, hanya untuk penggunaan dan konsumsi pribadi. Bahkan jika seseorang menyetujui aktivitas seksual tersebut direkam, bukan berarti dokumentasi tersebut dapat disimpan atau bahkan dibagikan ke orang lain. Persetujuan seseorang untuk merekamnya aktivitas tersebut, tidak menjamin ia akan kembali setuju untuk melakukannya lagi (Veda, 2021).

Dalam *consent*, terdapat elemen yang disingkat sebagai FRIES. Baik terkait dengan aktivitas seksual maupun pendokumentasian, FRIES harus diimplementasikan dan keberadaan FRIES tidak boleh ditafsirkan ada tanpa adanya konfirmasi atau konfirmasi ulang. Berikut ini adalah komponen-komponen FRIES, yang diambil dari

buku *Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku: Panduan Seri Kedua Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual* (Veda, 2021):

1. Sesuai dengan keinginan (*Freely giver*): masing-masing pihak hanya melakukan apa yang ia ingin lakukan, bukan apa yang diharapkan ataupun karena tekanan pihak lain
2. Dapat dibatalkan (*Reversible*): individu dapat mencabut persetujuan mereka untuk terlibat dalam aktivitas seksual, dan dokumentasi terkait dapat dihapus kapan saja
3. Terinformasi (*Informed*): hanya mendokumentasikan aktivitas seksual jika sesuai dengan kesepakatan awal dan kedua belah pihak punya pemahaman yang sama tentang situasi tersebut
4. Antusias dan sukarela (*Enthusiastic*): pastikan aktivitas seksual dan dokumentasi dilakukan secara sukarela, hindari partisipasi yang dipaksakan atau dimanipulasi, terutama ketika sedang tidak sadarkan diri
5. Spesifik (*Specific*): persetujuan yang diberikan untuk satu jenis aktivitas seksual, tidak dapat digunakan untuk jenis aktivitas seksual lainnya. Sama halnya dengan aktivitas mendokumentasikannya. Tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa mereka dapat membagikannya kepada siapa pun.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Mengungkap bingkai yang dibentuk oleh media siber SINDOnews.com dan Kompas.com atas pemberitaan kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non konsensual, pada periode Januari sampai dengan Juni 2022, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menafsirkan fenomena dan lebih mengutamakan makna daripada

generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018). Metode penelitian kualitatif deskriptif menganalisis dan menginterpretasi lebih dalam suatu fenomena, yang kemudian disajikan dalam bentuk kalimat untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan dengan tanda serta gambaran terkait pemberitaan media terhadap realitas sosial. Linstrom dan Marais menyebut metode kualitatif berguna ketika peneliti ingin memahami pengalaman komunikasi yang melibatkan interpretasi makna, alih-alih mengukur suatu fenomena (Linstrom & Marais, 2012). Penelitian jenis ini dipakai karena sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian, yakni untuk menggambarkan dan mengungkap realitas kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non konsensual dalam kaca mata media siber SINDOnews.com dan Kompas.com. Penulis tidak bermaksud untuk mengukur efek dari pemberitaan seperti pada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Sebaliknya, penulis ingin mencari tahu bagaimana media memaknai dan menafsirkan suatu isu.

Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam paradigma konstruktivis, data bersifat subjektif atau didasarkan pada pihak yang diteliti. Maka dari itu, data harus mencerminkan maksud dari subjek penelitian. Peneliti harus mewujudkan pikiran subjek penelitian untuk mendapatkan perspektif subjek (Hamad, 2005). Penelitian ini menganalisis teks dengan menggunakan analisis framing. Data yang diteliti adalah teks berita yang dianalisis dari yang ditulis oleh jurnalis.

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki. Hal pertama yang harus dilakukan dalam analisis framing adalah melihat bagaimana media mengonstruksi realitas. Suatu peristiwa tidak diterima begitu saja atau *taken for granted*, sebaliknya jurnalis dan media lah yang secara aktif membentuk realitas (Eriyanto, 2002). Realitas tercipta dalam konsepsi jurnalis. Berbagai peristiwa, fakta,

dan manusia, diabstraksi menjadi peristiwa yang muncul dalam bentuk berita. Titik persoalan dalam penelitian framing bukanlah pada apakah media memberitakan sesuatu peristiwa secara positif atau negatif, tetapi bagaimana media mengonstruksi realitas atas peristiwa. Model Pan dan Kosicki dipilih sebab model ini lebih detail dan komprehensif dalam membedah pembedahan berita.

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bingkai (*frame*) berita mengenai kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non konsensual yang dimuat pada media siber SINDOnews.com dan Kompas.com. Subjek penelitian ini ialah media siber SINDOnews.com dan Kompas.com. Kedua media siber tersebut dipilih sebab pada penelitian terdahulu terungkap bahwa terdapat perbedaan ideologi yang memengaruhi politik pemberitaan. Hal ini dapat dilihat dari cara media menyusun pesan-pesannya dan memilih bahasa yang mereka gunakan untuk melaporkan isu yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender.

SINDOnews.com yang berfokus pada kasus hukum dan kriminal, cenderung memberikan citra buruk pada perempuan karena dianggap sebagai akar permasalahan (Rohmah, 2017). Perempuan digambarkan sebagai pihak yang selalu bisa didominasi laki-laki, lemah dan pasif, serta tidak mempunyai otonomi atas dirinya sendiri sehingga keputusan laki-laki selalu dapat diterima tanpa ragu. Reportase dikemas dengan mengedepankan fantasi dan imajinasi untuk melahirkan berita-berita yang bombastis demi kepentingan kapital.

Kompas.com dengan ideologi yang humanis, cenderung menunjukkan kebebasan bersuara perempuan. Kompas.com tampak menyajikan argumentasi dan pembahasan yang relevan, serta telah berupaya untuk meliput secara *cover both side*

ketika memberitakan kasus kekerasan berbasis gender (Aristi, Janitra, & Prihandini, 2021). Eriyanto (2002) menyebut bahwa media selalu menekankan satu fakta di antara sekian banyak informasi dalam berita, ini dilakukan dengan maksud agar nantinya fakta yang diwartakan dapat condong kepada kepentingan tertentu.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara khusus didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, yakni dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen, contohnya dapat berupa data yang tersimpan di *web site*, kliping, otobiografi, dokumen pemerintah dan swasta, foto, video, dan lainnya (Anggito & Setiawan, 2018). Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui proses dokumentasi berita-berita di SINDOnews.com dan Kompas.com. Proses dokumentasi dimulai pada rentang waktu Oktober-November 2022.

Penulis mengakses portal media siber yang akan diteliti, yakni SINDOnews.com dan Kompas.com. Penulis kemudian mencari berita dengan menggunakan kata kunci “sebar foto mantan”, “ancam sebar foto syur”, dan “ancam sebar foto vulgar mantan” periode Januari-Juni 2022 pada filter pencarian masing-masing media. Periode tersebut dipilih karena mengacu pada laporan SAFEnet pada Triwulan I (Januari-Maret) dan Triwulan II (April-Juni) tahun 2022, yang dalam publikasinya menjabarkan bahwa kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non-konsensual di Indonesia masing-masing masih menduduki peringkat pertama dan kedua kasus KBGO yang paling ramai dilaporkan. Jika dibandingkan pada Triwulan III dan Triwulan IV yang jumlah laporannya agak sedikit menurun, pada 6 bulan awal tahun 2022 tersebut SINDOnews.com dan Kompas.com banyak memberitakan kasus

ancaman dan kasus penyebaran konten intim non-konsensual yang terjadi di Indonesia.

Dari hasil pengumpulan data, terdokumentasikan total 18 berita terkait kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non konsensual. Sebanyak 8 berita dari portal media siber SINDOnews.com dan 10 berita dari portal media siber Kompas.com. Selain mengumpulkan data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari jurnal akademik maupun jurnal artikel untuk menguatkan asumsi sebagai landasan teori.

### **G. Teknik Analisis Data**

Model analisis framing Pan dan Kosicki akan digunakan untuk menganalisis data. Pan dan Kosicki memetakan framing ke dalam empat struktur besar yang terdiri dari: 1) struktur sintaksis, 2) struktur skrip, 3) struktur tematik, 4) struktur retorik. Sebelum menganalisis, pertama-tama penulis mengumpulkan sejumlah berita terkait kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non konsensual yang dimuat pada media siber SINDOnews.com dan Kompas.com periode Januari-Juni 2022. Langkah terakhir adalah membandingkan frame kedua media siber tersebut mengenai kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non konsensual.

Pertama, struktur sintaksis yang merujuk pada pengertian susunan dan bagian berita, dapat diamati dari *headline*, *lead*, latar informasi, sumber dan penutup (Eriyanto, 2002). Elemen struktur sintaksis yang memiliki fungsi framing kuat yaitu *headline*, sebab *headline* punya tingkat kemenonjolan yang cukup tinggi. Selain *headline*, ada juga *lead* atau teras berita. *Lead* yang baik biasanya mengekspresikan perspektif berita. Selanjutnya, latar informasi adalah bagian yang dapat memengaruhi pemaknaan jurnalis. Sedangkan pengutipan sumber berita yang dimaksudkan untuk

mendorong objektivitas, menekankan bahwa jurnalis menulis apa yang dikatakan pihak berwenang, bukan opini tersendiri.

Kedua, pada struktur skrip dapat diamati dengan mengikuti pola kelengkapan berita 5W + 1H atau *what, who, when, where, why* dan *how*. Unsur kelengkapan berita ini bisa menjadi penanda framing, karena jika salah satu dari 5W+1H tersebut tidak ada, maka berita akan memiliki makna yang berbeda. Struktur skrip adalah salah satu cara mengonstruksi berita dan memahami suatu peristiwa dengan mengurutkan bagian-bagian berita dengan urutan tertentu. Untuk menyembunyikan informasi penting, skrip menekankan bagian mana yang didahulukan, dan yang mana yang bisa dihilangkan (Eriyanto, 2002).

Ketiga, struktur tematik. Struktur ini berkaitan dengan bagaimana fakta ditulis, yang dapat diamati dari koherensi kata dan proposisi. Koherensi menghubungkan beberapa kata faktual yang tidak berkaitan, sehingga nantinya dapat membuat kalimat baru yang terlihat saling berhubungan (Eriyanto, 2002). Keempat, struktur retorik menggambarkan gaya atau kata yang dipakai untuk menciptakan citra, menonjolkan sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran yang dimau. Leksikon, pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu; adalah beberapa elemen dari struktur retorik. Kata-kata yang digunakan termasuk penggunaan label tertentu, memiliki makna ideologis dan mencerminkan bagaimana pemaknaan terhadap realitas. Selain kata-kata, pemakaian caption, raster, grafik, gambar, dan tabel digunakan untuk menekankan arti tertentu. Elemen-elemen grafis ini mengendalikan perhatian dan minat, serta menunjukkan apakah informasi itu penting dan menarik (Eriyanto, 2002).

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan komprehensif yang dirancang untuk membantu memudahkan dalam menyajikan temuan-temuan

analitis dan penjelasan dari penelitian. Maka dari itu, penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 bab, yakni:

Bab I : bab ini mencakup pendahuluan dan pengantar berupa alasan kuat yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lalu kerangka teori, serta metodologi penelitian yang terdiri dari paradigma dan jenis penelitian, metode penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data; serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II : terdiri dari uraian dan penjelasan singkat mengenai gambaran umum subjek penelitian, yaitu media siber SINDOnews.com dan Kompas.com

Bab III : menjelaskan tentang analisis dari seluruh data yang telah diperoleh dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembingkai pemberitaan kasus ancaman dan kasus penyebaran konten intim non-konsensual di media siber SINDOnews.com dan Kompas.com periode Januari-Juni 2022 dengan menggunakan model analisis framing Pan dan Kosicki.

Bab IV : berisi kesimpulan terkait hasil analisis framing, sehingga dapat diketahui bagaimana kedua media siber tersebut membingkai pemberitaan, beserta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi. Selain itu, pada bab ini juga diberikan saran berdasarkan temuan penelitian.